

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*Fraud*) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk berperilaku bertentangan dengan hukum atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Kecurangan kerap kali terjadi di organisasi perusahaan maupun pemerintahan (Natasia, 2022).

Kecurangan merupakan masalah utama dalam industri akuntansi sering terjadi dan dimana saja ada peluang untuk terjadi. Perusahaan juga harus mengembangkan sistem pengendalian risiko penipuan untuk menghentikan penipuan laporan keuangan dan mempromosikan pengungkapan korupsi. Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2016), sebagai organisasi anti-*fraud* mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu, entitas atau pihak lainnya. Kecurangan yang terjadi pada lembaga keuangan disebabkan dari berbagai macam faktor yang

ada. Berbagai penyebab yang dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) dijelaskan pada *fraud triangle theory* dimana tekanan, peluang dan rasionalisasi dapat menjadi faktor terjadinya kecurangan (*fraud*).

Menurut Cressey (2019) kecurangan dapat disebabkan oleh tiga faktor yang disebut dengan konsep segitiga kecurangan atau *fraud triangle theory*). Tiga faktor inilah yang dapat dikatakan menjadi pemicu terjadinya kecurangan, yang terjadi dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Tuntutan gaya hidup dan adanya kesulitan dalam masalah keuangan serta ketidakpuasan karyawan pada organisasi juga dapat pula menjadi penyebab adanya tekanan (Wirakusuma dan Setiawan 2019). Kesempatan yang semakin leluasa untuk melakukan kecurangan dalam organisasi juga dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya kecurangan berulang kali atau semakin semakin besar (Donelson, *et.al.*, 2017). Menurut (Kumar, *et. al.*, 2018) untuk mengurangi faktor kesempatan ini maka penting untuk meningkatkan kemungkinan mendeteksi kecurangan serta penegakan hukum. Rasionalisasi merupakan suatu sikap atau karakter yang dimiliki oleh seseorang yang merasionalkan segala perbuatannya.

Kecurangan atau yang dalam bahasa pengauditan disebut dengan *fraud* beberapa tahun terakhir ini menjadi berita utama dalam pemberitaan media yang sering terjadi. Dalam akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya tidak diterapkan dalam suatu entitas. Banyak lembaga yang melakukan praktik kecurangan akuntansi baik sektor publik maupun sektor swasta. Bahkan, di Bali tindak

kecurangan terjadi pada tingkat paling rendah yaitu tindak kecurangan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Jayanti, 2018).

Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun (2017) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Desa Pekraman untuk mengayomi masyarakat (krama) desa dalam hal keuangan. Dasar kepercayaan seorang nasabah terhadap suatu lembaga keuangan dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban yang disajikan setiap rapat akhir tahun (RAT). Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi mengenai kinerja suatu lembaga dan menentukan kondisi lembaga tersebut sehat atau tidak. Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

LPD sebagai salah satu lembaga keuangan masyarakat desa harus senantiasa menjaga kepercayaan dengan mempertanggungjawabkan laporan keuangan agar dapat sesuai dengan pedoman atau sop yang berlaku. Tata kelola LPD sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun (2017) bahwa setiap LPD dikelola oleh Prajura LPD dengan *Panureksa* sebagai pengawas internal yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Peranan badan pengawas (*ponureksa*) yang dimulai dari prajuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasional pada LPD. Setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat

di desa tersebut. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari prajuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (Widyaswari, 2017).

Perkembangan ilmu akuntansi, selain memberikan manfaat juga menjadi salah satu sumber masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya tindak kecurangan (*fraud*). Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan lembaga perkreditan desa di Bali yang tidak sehat dan macet bahkan bangkrut hal ini tidak lepas akibat karena pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kecurangan dan dapat merugikan pihak lain, dimana banyak motivasi dari setiap individu atau manajemen melakukan kecurangan, diantaranya dikarenakan keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih dari hasil kerja yang didapatnya, maka ketika individu tersebut memiliki moralitas yang rendah dan memiliki kesempatan kemungkinan individu tersebut akan melakukan tindakan kecurangan, seperti contoh kasus pada LPD Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di LPD Kedewatan, Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar, terjadi pada tahun 2010-2011. Tiga tersangka yaitu, bendahara LPD, Nyoman Ribek, bersama Ketua LPD, Wayan Mendrawan, dan Sekretaris LPD, Daging Palguna, telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi atas dana LPD Kedewatan dengan jumlah Rp11,58 miliar,

namun oknum pengurus LPD yang terlibat dalam kasus ini tidak bisa mengembalikan dana secara penuh meskipun seluruh aset yang dimiliki sudah dijual, sedangkan nasabah LPD menuntut agar seluruh dana warga dikembalikan. Kasus ini mulai terungkap pada pertengahan 2022, dimana LPD Kedewatan tidak mampu dalam melayani nasabah sehingga nasabah kesulitan untuk melakukan pencairan dana mereka yang ada di LPD tersebut. (Sumber: NusaBali.com, 2024 URL: <https://www.nusabali.com/berita/173775/korupsi-lpd-kedewatan-tiga-terdakwa-divonis-ringan>).

Kecurangan (*fraud*) menjadi penting untuk diteliti karena tindakan kecurangan dampaknya dapat merugikan perusahaan, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Kecurangan seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan wewenang, dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, merusak reputasi perusahaan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi.

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yaitu pengendalian internal. Menurut Adnyani (2022), pengendalian internal merupakan sistem kontrol yang sangat penting di dalam suatu organisasi dengan peraturan yang berlaku. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat pengendalian intern yang rendah maka tingkat kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin tinggi, sebaliknya jika tingkat pengendalian intern yang ada pada organisasi atau perusahaan berjalan dengan baik maka tingkat kecenderungan untuk melakukan kecurangan akan semakin rendah. Hasil penelitian Febriani (2019) menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, artinya semakin efektif pengendalian internal dalam sebuah perusahaan semakin rendah kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fadhilah (2021), Pratiwi dan Werastuti (2021), Pujayani dan Dewi (2021), Rahmi dan Helmayunita (2019), Nitimiani dan Suardika (2020), Ayumi (2022), yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Juliantari, dkk (2021) dan Wiguna, dkk (2024), yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan menurut Adhivinna dan Agustin (2021) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena, mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan besar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan (Amalia, 2020). Menurut Widyaningsih (2019), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi

terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hasil penelitian Adnyani (2022), Dewantara (2024), Dewi (2022), Fajri (2019), Cinthyani dan Sullindawati (2020) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan artinya, bahwa semakin suatu manajemen taat pada aturan akuntansi maka semakin rendah pula kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari, dkk (2021), Wiguna, dkk (2024) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan menurut Firdausy dan Sari (2022), Diliana, dkk (2022) ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor ketiga, yaitu sistem kompensasi. Menurut Dewantara (2024), kompensasi merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir kecurangan, karena kompensasi merupakan imbalan material yang diterima seseorang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tingkat kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adnyani (2022), Ayumi (2022), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem kompensasi berpengaruh

negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Guztarina (2021) menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Fajri (2019), Juliantari, dkk (2021), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor ke empat, yaitu asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*). Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Adanya asimetri informasi antara manajer sebagai (*agent*) dan pemilik (*principal*) menyebabkan kesenjangan pengetahuan keuangan internal perusahaan sehingga pihak manajer bisa melakukan rekayasa demi meningkatkan laba untuk mendapat kompensasi atau imbalan dari pemilik. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Pemilik menginginkan pengembalian yang sebesar- besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki, sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi atau bonus yang "memadai" dan sebesar- besarnya atas kinerjanya (Astari, 2018). Menurut penelitian Pujayani dan Dewi (2021), Juliantari, dkk (2021), Adwitya dan Sari (2020), Akbar dan Arza (2023),

Nitimiani dan Suardika (2020), Cinthyani dan Sullindawati (2020), asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang teliti oleh Amalia (2020) yang menyatakan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, moralitas manajemen juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum yang dimaksud itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak (Glifandi, 2011). Seperti yang dikutip oleh Glifandi (2011) dalam penelitian sebelumnya, moralitas manajemen tidak berkaitan dengan keuntungan atau pemaksimalan nilai. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa moralitas manajemen adalah pelaksanaan kewajiban mutlak oleh manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai moral dengan kesadaran sendiri. Menurut Pratiwi,dkk (2024), Wahyuni dan Helmarini (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan menurut Sari, dkk (2021) menyatakan bahwa moralitas manajemen berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rizky, dkk (2022) yang menyatakan bahwa moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk meneliti ulang dengan judul “**Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Sistem Kompensasi, Asimetri Informasi Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?
- 2) Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?
- 3) Apakah sistem kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?
- 4) Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?

- 5) Apakah moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
- 2) Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sistem kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan di LPD. Berdasarkan teori Keagenan, penelitian ini membahas konflik kepentingan pemilik dan manajer serta peran sistem pengendalian internal dalam mengurangi risiko fraud. Teori Atribusi digunakan untuk memahami pengaruh moralitas manajemen dan kepatuhan akuntansi terhadap perilaku individu. Hasil penelitian ini memperkaya literatur pencegahan fraud dan menjadi referensi bagi akademisi serta praktisi dalam mengembangkan strategi keuangan yang lebih transparan dan etis.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud). Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Pihak manajemen dapat menerapkan sistem kompensasi yang adil untuk meminimalkan potensi kecurangan di lingkungan kerja. Selain itu, kesadaran akan pentingnya moralitas manajemen dapat ditingkatkan guna menciptakan budaya kerja yang lebih etis. Temuan penelitian ini juga dapat membantu regulator dan auditor dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah fraud di sektor keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dalam pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Namun, untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya terlihat di kontrak.

Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi

yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Dalam keadaan seperti ini prinsipal membutuhkan informasi yang dimiliki oleh agen mengenai keadaan perusahaan dan kinerja agen itu sendiri, sehingga asimetri membuat manajemen bertindak cenderung berlaku curang dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi prinsipal demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi.

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Dengan kompensasi yang sesuai, kecurangan dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak berlaku curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

2.1.2 Teori Atribusi

Atribusi adalah proses mengenali penyebab dari tingkah laku orang lain serta sekaligus memperoleh pengetahuan tentang sifat-sifat dan disposisi-posisi yang menetap pada orang lain. Teori atribusi dikembangkan oleh Kelley (2007), berpandangan bahwa perilaku kepemimpinan disebabkan oleh atribut penyebab. Jadi teori kepemimpinan atribut menjelaskan mengapa perilaku kepemimpinan terjadi.

Teori ini tidak terlepas dari perilaku orang dalam organisasi, yaitu perilaku pimpinan dan perilaku bawahan. Jadi kepemimpinan tidak terlepas dari cara berpikir, berperasaan, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam kerja di sebuah organisasi dengan bawahannya atau orang lain. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab. Termasuk tindakan tidak etis maupun kecurangan yang terjadi. Faktor-faktor seperti pengendalian internal dan kompensasi merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan tersebut.

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif diharapkan dapat mengurangi adanya kecurangan.

2.1.3 Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 (PP RI Nomor 60 2008) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan menandai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal merupakan pintu masuk dari besar kecilnya peluang untuk melakukan kecurangan. Pengendalian internal yang lemah dan kontrol pengawasnya tidak adanya kejujuran, sehingga kinerjanya juga lemah mengakibatkan para pembuat kejahatan leluasa untuk melakukan kecurangan. Menurut COSO (*The Comitte Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission*), pengendalian internal tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya.

Terdapat lima komponen kerangka pengendalian internal COSO (*The Comitte Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission*) sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian, merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik.
- 2) Penaksiran risiko, manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar.

- 3) Aktivitas pengendalian, kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.
- 4) Informasi dan komunikasi, merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturanyang berlaku pada perusahaan.
- 5) Pemantuan, merupakan kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan.

Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

2.1.4 Ketaatan Aturan Akuntansi

1) Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Suarianti (2020), ketaatan adalah suatu sikap patuh kepada aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan atau dituruti. Di dalam

suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan jalannya berbagai kegiatan di dalam perusahaan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi. Menurut Astari (2018), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikianrupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Dengan demikian ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya. Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor. Apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi, dimana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.

Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan. Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan (Thoyibatun, 2019).

2) Tujuan Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Suarianti (2020), ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi bertujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang - undangan.
- 2) Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi, khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

3) Ketaatan Aturan Akuntansi Dalam Pembuatan Laporan Keuangan.

Menurut PP RI nomor 24, 2005 tentang SAP dalam Thoyibatun (2019) menyebutkan bahwa persyaratan pengungkapan pada setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing - masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan-laporan tersebut dibuat dalam bentuk dan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam SAP agar kinerja organisasi antarperiode dapat dibandingkan.

2.1.5 Sistem Kompensasi

Menurut Irman (2023), kompensasi perlu dibedakan dengan gaji dan upah, karena konsep kompensasi tidak sama dengan konsep gaji atau upah. Gaji dan upah merupakan salah satu bentuk konkret atas pemberian kompensasi. Untuk lebih jelasnya, kompensasi itu bukan hanya berupa gaji atau upah, tetapi ada hal-hal lainnya.

Kompensasi yang memadai seharusnya mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindakan curang. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan hasil kerja karyawan atau imbalan berupa nilai nominal (uang) yang diberikan kepada karyawan oleh

atasan dalam bentuk imbalan. Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efisien dan produktif, karena kompensasi merupakan alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan yang beragam. Namun, kompensasi bukanlah satu-satunya motivasi bagi karyawan untuk menjadi unggul, namun kompensasi adalah salah satu motivasi penting yang ikut mendorong karyawan untuk berprestasi (Azhari, 2023).

Kompensasi merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir kecurangan, karena kompensasi merupakan imbalan material yang diterima seseorang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan (Suprpta & Pradnyawati, 2021). Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tingkat kecurangan.

Dengan demikian, kompensasi mempunyai arti yang luas, selain terdiri dari gaji dan upah, dapat pula berbentuk fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, pakaian seragam, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pangan dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta cenderung diterima oleh karyawan secara tetap.

2.1.6 Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah ketidaksamaan informasi yang diperoleh agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen disebabkan karena distribusi

informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi pegawai pemerintah untuk melakukan kecurangan dengan menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Selvia, 2023).

Asimetri informasi ini timbul karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen dan agen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan Astari (2018). Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen.

Dengan kata lain asimetri informasi merupakan kondisi dimana adanya ketidakselarasan informasi yang diterima antara pihak yang menyediakan informasi atau yang memiliki informasi dengan pihak yang menerima atau membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

- 1) *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar, dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

- 2) *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham dengan melanggar kontrak yang sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2.1.7 Moralitas Manajemen

Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Moralitas manajemen merupakan tindakan manajemen untuk melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai (Puspita, 2022). Dalam perusahaan, semakin tinggi moralitas manajemen, maka diharapkan tindak kecurangan dapat dihindarkan.

Dalam teori atribusi, tindakan seseorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab (Green and Mitchell, 1979). Moralitas merupakan faktor penting dalam timbulnya kecenderungan. Kecurangan juga dipengaruhi oleh moralitas orang yang terlibat di dalamnya, dengan adanya moralitas yang baik diharapkan tindakan melakukan kecurangan akan berkurang. Moralitas manajemen pada tahapan pasca-komersial menunjukkan kematangan moral manajemen yang tinggi. Semakin tinggi tahapan dalam moralitas manajemen, maka

manajer akan semakin berhati – hati dalam tindakannya yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

2.1.8 Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya pencurian, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan maupun kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan yang tinggi (*white collar crime*). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2016) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan yang dibuat oleh seseorang atau badan, yang mengetahui, bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lainnya. Kecurangan (*fraud*) menjadi akar dari permasalahan moral, etika, mental, tata nilai dan cara berfikir yang melandasi tindak kejahatan. *Fraud* itu sendiri secara umum dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lainnya.

Kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut (Azhri, 2023). Adanya peluang yang besar membuat kecurangan (*fraud*) lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik atau efektif. Alasan utama untuk melakukan pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang realistis

bahwa tujuan setiap aktivitas perusahaan akan dicapai dengan resiko minimal bahkan menghilangkan resiko yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran, bahaya, kehilangan yang disebabkan oleh kerugian dan penyelewengan/kecurangan dari aktivitas lain yang merugikan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2016) menyebutkan kecurangan (*Fraud*) terdapat 3 kategori berdasarkan perbuatan, yaitu:

1) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dan saling menikmati keuntungan. Kecurangan jenis ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurangnya kesadaran akan tata kelola yang lebih baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Jenis korupsi yang sering terjadi yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, konflik kepentingan, penerimaan yang tidak sah atau legal, dan pemerasan secara ekonomi.

2) Penyelewengan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi, karena sifatnya yang dapat diukur. Kemudahan tersebut didapat dengan pemahaman yang baik mengenai pengendalian intern dalam pos-pos merupakan

teknik yang baik untuk mendeteksi kecurangan yang berkaitan dengan penyelewengan aset ini.

3) Penyelewengan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Penyelewengan ini dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan dan instansi yang bertujuan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan manipulasi keuangan dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau mungkin untuk menurunkan kewajiban. Tindakan penyelewengan ini tentunya akan menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

2.1.9 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Latrini (2019) menggunakan variabel independen yaitu, pengaruh pengendalian internal, budaya organisasi, moralitas, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan (*fraud*). Lokasi penelitian ini di LPD se-Kabupaten Gianyar menggunakan teknik analisis regresi linear berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas berpengaruh negatif pada Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) di LPD se-Kabupaten Gianyar.

Penelitian Febriani (2019) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Kota Tegal, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal

dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Fajri (2019) meneliti dengan menggunakan variabel independen yaitu, pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di OPD Kabupaten Magelang, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Adwitya dan Sari (2020) yang meneliti dengan menggunakan variabel independen yang digunakan yaitu, asimetri informasi dan ketaatan aturan akuntansi sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di Pemerintahan Kota Payakumbuh, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Nitimiani dan Suardika (2020) melakukan penelitian dengan variabel independen pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, dan efektivitas pengendalian internal sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu

kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Tegallalang, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu dan efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Tegallalang, sedangkan asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Tegallalang.

Cinthyani dan Sullindawati (2020) melakukan penelitian dengan variabel independen asimetri informasi, kecerdasan spiritual, integritas prajuru, ketaatan aturan akuntansi sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di LPD Di Kecamatan Seririt, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt sedangkan, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt.

Pujayani dan Dewi (2021) meneliti dengan menggunakan variabel independen moralitas individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, budaya organisasi sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat pada LPD di Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan teknik analisis regresi

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng.

Penelitian Juliantari, dkk (2021) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel independen yang digunakan yaitu, keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, moralitas manajemen sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di LPD di Kecamatan Karangasem, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas variabel pengendalian internal, kepatuhan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap tren kecurangan akuntansi. Variabel budaya etika organisasi dan moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap tren kecurangan akuntansi.

Apriana dan Ayu (2021) meneliti dengan variabel independen asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat pada LPD Se-Kecamatan Tegallalang, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Sedaangkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se- Kecamatan Tegallalang.

Ayumi (2022) meneliti dengan menggunakan variabel independen sistem pengendalian intern, moralitas, kesesuaian kompensasi sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di LPD Se- Kecamatan Abiansemal, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas, kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se- Kecamatan Abiansemal.

Adnyani (2022) yang meneliti dengan menggunakan variabel independen pengendalian internal, moralitas, kesesuaian kompensasi, profesionalisme badan pengawas, dan ketaatan aturan akuntansi sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di LPD Se - Kecamatan Abiansemal, dengan menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, moralitas, kesesuaian kompensasi, profesionalisme badan pengawas, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se – Kecamatan Abiansemal.

Dewi (2022) yang meneliti dengan menggunakan variabel independen pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, ketaatan aturan akuntansi,

sumber daya manusia dan budaya organisasi sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di Koperasi Se – Kecamatan Gianyar Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UMKM, dengan menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, sumber daya manusia, budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Koperasi Se – Kecamatan Gianyar Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UMKM.

Rahayu dan Sudiana (2023) meneliti dengan variabel independen asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, integritas sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat pada LPD di Kecamatan Abiansemal, dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya ketaatan terhadap aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Abiansemal.

Akbar dan Arza (2023) meneliti dengan variabel independen pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di Organisasi Perangkat Daerah Kota

Padang, dengan menggunakan teknis analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dewantara (2024) yang meneliti dengan variabel independen pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan kepuasan kerja, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Lokasi penelitian ini bertempat di LPD Se – Kecamatan Tegallalang, dengan menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD Se – Kecamatan Tegallalang.

Secara umum persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel yang berfungsi menguji kecenderungan kecurangan akuntansi pada suatu lembaga keuangan. Perbedaan secara umum adalah lokasi penelitian yaitu pada LPD Se Kecamatan Ubud dan periode tahun penelitian.